

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruq, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
- Anggara, Sahya. *Administrasi Kepegawaian Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Arif, Firman Muhammad. *Maqasid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tanah Luwu*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Arif, Syaiful, *Humanisme Gus Dur Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Ar-Raudli, M. Maftuhin. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Zaman (Uraian Langka Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Disertamai dengan Contoh-Contoh yang Aktual)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2015.
- Asmara, Musda dan Reti Andira. "Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maslahah Mursalah*", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 208.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan Daerah, "Pernikahan dan Perceraian PNS", https://bkd.cilacapkab.go.id/page/pernikahan_dan_perceraian_pns diakses pada tanggal 16 April 2022.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Cintaanito, Novendia Dara. "Problematika Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Terkait Biaya Penghidupan Anak dan Mantan Istri," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2020).
- Hardjono M., Ary Bima. "Implementasi Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Terkait Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Perceraian Tanpa Memperoleh Izin Dari Pejabat (Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang)". Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum dan Universitas Brawijaya Malang, 2021.

- Hartini, Sri, Siti Sunarti dan Tenang Haryanto. “Analisis Sanksi Hukuman Disiplin Berat Pegawai Negeri Sipil Setelah Dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Hukuman Disiplin PNS,” *Jurnal LPPM Unsoed* 11, no. 1, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (2022).
- Mahmadatun, Siti. “Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990”, *Millah* 16, no. 2 (2016): 317.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Mattori, Muhammad. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda*. Jakarta: Guepedia, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nardadi, Zulfan. “Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Mantan Isteri dan Anak Setelah Perceraian”. Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Nurfaizin, Mochammad Ajib. *Otomatisasi dan Tata Kelola Kepegawaian Berbasis Pendekatan Kontekstual*. Jombang: Administrasi Kepegawaian, 2020.
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Kediri. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Kediri: Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Kediri, 2021.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250).
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1990 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705).

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718).

Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 2199/Pdt.G/2017/PA.Cjr, Tanggal 27 November 2017 diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Rumapea, Rony Alfredo. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang atas Kesalahan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil," *Sasi* 25, no. 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Maluku (2019).

Sari, Milya. "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 48.

Sari, Putu Puspita, Juwita dan Misbahul Huda, "Penerapan Sanksi Administrasi Hukuman Disiplin Berat Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI (Studi Kasus Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1012/M/X/2020)", *Syntax Literate* 7, no. 4, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam (2022).

Sarnawa, Bagus dan Hayu Sukiyoprati. *Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Citra Prima Persada, 2007.

Sidiq, Syahrul. "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 1 (2017): 155.

Sovia, Sheyla Nichlatus dkk. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Thahier, Rohana. “Kendala dan Solusi Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat”, *Administrasi Negara* 21, no. 1 (2015): 17.
- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqāshidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalah*. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2015.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Wahyono, Aries Dwi. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pati”. Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Wahyuni, Sri. *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-Faktor Determinan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Wasik, Abdul dan Samsul Arifin. *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.